



SALINAN

**BUPATI OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 20 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG
STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- b. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan perkembangan pelaksanaan perjalanan dinas, perlu mengubah Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
8. Peraturan Menteri Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara, Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 811);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2021 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2022 Nomor 22);

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2022 Nomor 22), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA SKPD yang bersangkutan.
 - (2) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dapat dilakukan dengan mekanisme UP/GU dan/atau TU, khusus bagi pimpinan dan anggota DPRD biaya Perjalanan Dinas dapat dilakukan dengan mekanisme LS.
 - (3) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas melalui mekanisme UP/GU/TU dilakukan dengan memberikan uang muka kepada Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai ASN, Pegawai Non ASN yang melaksanakan Perjalanan Dinas oleh Bendahara Pengeluaran dari UP/GU/TU yang dikelolanya.
 - (4) Besarnya uang muka yang diberikan, berdasarkan persetujuan PA/KPA, dengan besaran maksimal 60% (enam puluh persen).
2. Ketentuan ayat (7), ayat (8), ayat (9), dan ayat (10) Pasal 23 diubah dan diantara ayat (7) dan ayat (8) Pasal 23 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (7a), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) SPD merupakan salah satu bukti, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Perjalanan Dinas.
- (2) Dalam SPD tidak boleh ada penghapusan atau cacat dalam tulisan.
- (3) Perubahan SPD dapat dilakukan dengan coretan dan dibubuhi paraf dari pejabat yang berwenang.
- (4) Perhitungan besar jumlah biaya Perjalanan Dinas dicatat secara terperinci dalam kuitansi yang merupakan lampiran SPD.

(5) Pembayaran . . .

- (5) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dicatat pada kuitansi yang merupakan lampiran SPD dengan dibubuhi tandatangan bendahara pengeluaran SKPD bersangkutan serta tanda tangan yang melakukan Perjalanan Dinas.
- (6) Pada SPD dicatat :
 - a. tanggal berangkat dari tempat kedudukan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk;
 - b. tanggal tiba dan berangkat di dan dari tempat tujuan ditandatangani oleh pihak/pejabat tempat tujuan; dan
 - c. tanggal tiba kembali di tempat kedudukan dan ditandatangani Pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk.
- (7) Paling lama 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan, pelaksana Perjalanan Dinas menyampaikan pertanggungjawaban perjalanan dinas kepada PA/KPA dengan melampirkan:
 - a. ST yang sah;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh PA/KPA dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. daftar pengeluaran riil;
 - e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak dibidang jasa penyewaan kendaraan;
 - f. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya; dan
 - g. laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.
- (7a) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas paling sedikit melampirkan:
 - a. ST yang sah;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh PA/KPA dan Pejabat di tempat tujuan perjalanan dinas dengan Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

c. Kuitansi . . .

- c. kuitansi tanda terima pembayaran biaya Perjalanan Dinas *lumpsum* dengan besaran *lumpsum* dihitung untuk seluruh komponen biaya Perjalanan Dinas satuan yang dibayarkan oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dengan format kuitansi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - d. Pakta Integritas yang merupakan pernyataan tentang komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab perjalanan dinas sesuai Surat Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - e. laporan pelaksanaan perjalanan dinas yang ditandatangani pelaksana perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto.
- (8) Pada saat penyerahan SPD dan laporan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (7a), diadakan perhitungan kembali apabila terdapat kekurangan/kelebihan biaya Perjalanan Dinas dari yang telah dibayarkan semula.
 - (9) Uang muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) pada Perjalanan Dinas berikutnya dapat diberikan apabila pertanggungjawaban Perjalanan Dinas sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (7a) telah disampaikan.
 - (10) Format laporan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (11) Pada dasarnya pertanggungjawaban mengenai biaya Perjalanan Dinas yang telah dibayarkan dibatasi hingga pada pembuktian bahwa Perjalanan Dinas dimaksud benar telah dilakukan dengan tujuan dan waktu yang telah ditetapkan.
3. Diantara Ketentuan Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 2 pasal yakni Pasal 25A dan Pasal 25B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25A

- (1) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dilakukan secara *at cost* (biaya riil).
- (2) Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dilakukan secara *lumpsum* dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel.

Pasal 25B . . .

Pasal 25B

Pada saat penyerahan SPD dan laporan Perjalanan Dinas, dokumen pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD paling sedikit melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (7a).

4. Ketentuan Lampiran I, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran VI, Lampiran VII, dan Lampiran IX Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 15 Desember 2023
Pj. BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.

TEDDY MEILWANSYAH

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 15 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

ttd.

DHARMAWAN IRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2023 NOMOR 20

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OKU,



EKA MEIRWANZA, SH.MM
PENATA TINGKAT I (III/d)
NIP. 197705012009031002

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 20 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22
TAHUN 2022 TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA
PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

SATUAN BIAYA UANG PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

NO.	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL				
			KEPALA DAERAH/ KETUADPRD/ PEJABAT ESELONI	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELONII	PEJABAT ESELONIII / GOLONGAN IV	PEJABAT ESELONIV/ GOLONGANIII	GOLONGAN I / II
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ACEH	OH	4.420.000,-	3.526.000,-	1.533.000,-	770.000,-	770.000,-
2.	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000,-	2.195.000,-	1.100.000,-	699.000,-	699.000,-
3.	RIAU	OH	3.820.000,-	3.119.000,-	1.650.000,-	852.000,-	852.000,-
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	5.344.000,-	2.318.000,-	1.297.000,-	792.000,-	792.000,-
5.	JAMB!	OH	5.000.000,-	4.102.000,-	1.225.000,-	580.000,-	580.000,-
6.	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000,-	3.332.000,-	1.353.000,-	701.000,-	701.000,-
7.	SUMATERA SELATAN	OH	5.850.000,-	3.083.000,-	1.955.000,-	861.000,-	861.000,-
8.	LAMPUNG	OH	4.491.000,-	2.488.000,-	1.425.000,-	580.000,-	580.000,-
9.	BENGKULU	OH	2.140.000,-	1.628.000,-	1.546.000,-	692.000,-	692.000,-
10.	BANGKA BELITUNG	OH	3.827.000,-	2.838.000,-	1.957.000,-	649.000,-	649.000,-
11.	BANTEN	OH	5.725.000,-	2.373.000,-	1.204.000,-	724.000,-	724.000,-
12.	JAWA BARAT	OH	5.381.000,-	2.755.000,-	1.201.000,-	686.000,-	686.000,-
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	8.720.000,-	2.063.000,-	992.000,-	730.000,-	730.000,-
14.	JAWA TENGAH	OH	5.303.000,-	1.850.000,-	1.201.000,-	750.000,-	750.000,-
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	5.017.000,-	2.695.000,-	1.384.000,-	845.000,-	845.000,-
16.	JAWA TIMUR	OH	4.449.000,-	2.007.000,-	1.153.000,-	814.000,-	814.000,-
17.	BALI	OH	6.848.000,-	2.433.000,-	1.685.000,-	1.138.000,-	1.138.000,-
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	4.375.000,-	2.648.000,-	1.418.000,-	907.000,-	907.000,-
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.750.000,-	2.133.000,-	1.355.000,-	688.000,-	688.000,-
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	2.654.000,-	1.923.000,-	1.125.000,-	538.000,-	538.000,-
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.901.000,-	3.391.000,-	1.160.000,-	659.000,-	659.000,-
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.797.000,-	3.316.000,-	1.500.000,-	697.000,-	697.000,-
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000,-	2.188.000,-	1.507.000,-	804.000,-	804.000,-
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000,-	2.735.000,-	1.507.000,-	804.000,-	804.000,-
25.	SULAWESI UTARA	OH	4.919.000,-	2.290.000,-	1.207.000,-	978.000,-	978.000,-
26.	GORONTALO	OH	4.168.000,-	3.107.000,-	1.606.000,-	955.000,-	955.000,-
27.	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000,-	3.098.000,-	1.344.000,-	704.000,-	704.000,-
28.	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000,-	1.938.000,-	1.423.000,-	745.000,-	745.000,-
29.	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000,-	2.027.000,-	1.679.000,-	951.000,-	951.000,-
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	3.088.800,-	2.574.000,-	1.297.000,-	786.000,-	786.000,-
31.	MALUKU	OH	3.467.000,-	3.240.000,-	1.059.000,-	667.000,-	667.000,-
32.	MALUKU UTARA	OH	4.611.000,-	3.843.000,-	1.160.000,-	605.000,-	605.000,-
33.	PAPUA	OH	3.859.000,-	3.318.000,-	2.521.000,-	1.038.000,-	1.038.000,-
34.	PAPUA BARAT	OH	3.872.000,-	3.341.000,-	2.056.000,-	967.000,-	967.000,-
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	3.872.000,-	3.341.000,-	2.056.000,-	967.000,-	967.000,-
36.	PAPUA TENGAH	OH	3.859.000,-	3.318.000,-	2.521.000,-	1.038.000,-	1.038.000,-
37.	PAPUA SELATAN	OH	5.673.000,-	4.877.000,-	3.706.000,-	1.526.000,-	1.526.000,-
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	5.711.000,-	4.911.000,-	3.731.000,-	1.536.000,-	1.536.000,-

Pj. BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OKU,

EKA MEIRWANZA, SH.MM
PENATA TINGKAT I (III/d)
NIP. 197705012009031002

TEDDY MEILWANSYAH

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
 NOMOR 20 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22
 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA
 PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA (Rp.)	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM (Rp.)	DIKLAT (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1.	ACEH	OH	360.000,-	140.000,-	110.000,-
2.	SUMATERA UTARA	OH	370.000,-	150.000,-	110.000,-
3.	RIAU	OH	370.000,-	150.000,-	110.000,-
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000,-	150.000,-	110.000,-
5.	JAMBI	OH	370.000,-	150.000,-	110.000,-
6.	SUMATERA BARAT	OH	380.000,-	150.000,-	110.000,-
7.	SUMATERA SELATAN	OH	380.000,-	150.000,-	110.000,-
8.	LAMPUNG	OH	380.000,-	150.000,-	110.000,-
9.	BENGKULU	OH	380.000,-	150.000,-	110.000,-
10.	BANGKA BELITUNG	OH	410.000,-	160.000,-	120.000,-
11.	BANTEN	OH	370.000,-	150.000,-	110.000,-
12.	JAWA BARAT	OH	430.000,-	170.000,-	130.000,-
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	530.000,-	210.000,-	160.000,-
14.	JAWA TENGAH	OH	370.000,-	150.000,-	110.000,-
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	420.000,-	170.000,-	130.000,-
16.	JAWA TIMUR	OH	410.000,-	160.000,-	120.000,-
17.	BALI	OH	480.000,-	190.000,-	140.000,-
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000,-	180.000,-	130.000,-
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000,-	170.000,-	130.000,-
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000,-	150.000,-	110.000,-
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000,-	140.000,-	110.000,-
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000,-	150.000,-	110.000,-
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000,-	170.000,-	130.000,-
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000,-	170.000,-	130.000,-
25.	SULAWESI UTARA	OH	370.000,-	150.000,-	110.000,-
26.	GORONTALO	OH	370.000,-	150.000,-	110.000,-
27.	SULAWESI BARAT	OH	410.000,-	160.000,-	120.000,-
28.	SULAWESI SELATAN	OH	430.000,-	170.000,-	130.000,-
29.	SULAWESI TENGAH	OH	370.000,-	150.000,-	110.000,-
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000,-	150.000,-	110.000,-
31.	MALUKU	OH	380.000,-	150.000,-	110.000,-
32.	MALUKU UTARA	OH	430.000,-	170.000,-	130.000,-
33.	PAPUA	OH	580.000,-	230.000,-	170.000,-
34.	PAPUA BARAT	OH	480.000,-	190.000,-	140.000,-
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	480.000,-	190.000,-	140.000,-
36.	PAPUA TENGAH	OH	580.000,-	230.000,-	170.000,-
37.	PAPUA SELATAN	OH	580.000,-	230.000,-	170.000,-
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	580.000,-	230.000,-	170.000,-

Pj. BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA KABUPATEN OKU,



EKA MEIRWANZA, SH.MM
 PENATA TINGKAT I (III/d)
 NIP. 197705012009031002

TEDDY MEILWANSYAH

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
 NOMOR 20 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22
 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA
 PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

**SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI
 KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)**

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	ACEH			
1.	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat	Orang/Kali	275.000,-
2.	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	Orang/Kali	298.000,-
3.	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	Orang/Kali	183.000,-
4.	Banda Aceh	Kab. Aceh Jaya	Orang/Kali	238.000,-
5.	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	Orang/Kali	325.000,-
6.	Banda Aceh	Kab. Aceh Singkil	Orang/Kali	420.000,-
7.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tamiang	Orang/Kali	315.000,-
8.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tengah	Orang/Kali	293.000,-
9.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	Orang/Kali	460.000,-
10.	Banda Aceh	Kab. Aceh Timur	Orang/Kali	289.000,-
11.	Banda Aceh	Kab. Aceh Utara	Orang/Kali	270.000,-
12.	Banda Aceh	Kab. Bener Meriah	Orang/Kali	278.000,-
13.	Banda Aceh	Kab. Bireuen	Orang/Kali	220.000,-
14.	Banda Aceh	Kab. Gayo Lues	Orang/Kali	370.000,-
15.	Banda Aceh	Kab. Nagan Raya	Orang/Kali	275.000,-
16.	Banda Aceh	Kab. Pidie	Orang/Kali	190.000,-
17.	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	Orang/Kali	205.000,-
18.	Banda Aceh	Kota Langsa	Orang/Kali	301.000,-
19.	Banda Aceh	Kota Lhokseumawe	Orang/Kali	240.000,-
20.	Banda Aceh	Kota Subulussalam	Orang/Kali	400.000,-
	SUMATERA UTARA			
21.	Medan	Kab. Asahan	Orang/Kali	259.000,-
22.	Medan	Kab. Batubara	Orang/Kali	225.000,-
23.	Medan	Kab. Dairi	Orang/Kali	270.000,-
24.	Medan	Kab. Deli Serdang	Orang/Kali	186.000,-
25.	Medan	Kab. Humbang Hasundutan	Orang/Kali	300.000,-
26.	Medan	Kab. Karo	Orang/Kali	200.000,-
27.	Medan	Kab. Labuhan Batu	Orang/Kali	287.000,-
28.	Medan	Kab. Labuhan Batu Selatan	Orang/Kali	360.000,-
29.	Medan	Kab. Labuhan Batu Utara	Orang/Kali	300.000,-
30.	Medan	Kab. Langkat	Orang/Kali	186.000,-
31.	Medan	Kab. Mandailing Natal	Orang/Kali	420.000,-
32.	Medan	Kab. Padang Lawas	Orang/Kali	420.000,-
33.	Medan	Kab. Padang Lawas Utara	Orang/Kali	420.000,-
34.	Medan	Kab. Pakpak Bharat	Orang/Kali	300.000,-
35.	Medan	Kab. Samosir	Orang/Kali	330.000,-
36.	Medan	Kab. Serdang Bedagai	Orang/Kali	200.000,-
37.	Medan	Kab. Simalungun	Orang/Kali	264.000,-
38.	Medan	Kab. Tapanuli Selatan	Orang/Kali	328.000,-
39.	Medan	Kab. Tapanuli Tengah	Orang/Kali	345.000,-
40.	Medan	Kab. Tapanuli Utara	Orang/Kali	330.000,-
41.	Medan	Kab. Toba	Orang/Kali	300.000,-
42.	Medan	Kota Binjai	Orang/Kali	180.000,-

43.	Medan	Kota Pematang Siantar	Orang/Kali	225.000,-
44.	Medan	Kota Sibolga	Orang/Kali	345.000,-
45.	Medan	Kota Tanjung Balai	Orang/Kali	285.000,-
46.	Medan	Kota Tebing Tinggi	Orang/Kali	203.000,-
RIAU				
47.	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hilir	Orang/Kali	380.000,-
48.	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hulu	Orang/Kali	315.000,-
49.	Pekanbaru	Kab. Kampar	Orang/Kali	200.000,-
50.	Pekanbaru	Kab. Kuantan Singingi	Orang/Kali	300.000,-
51.	Pekanbaru	Kab. Pelalawan	Orang/Kali	225.000,-
52.	Pekanbaru	Kab. Rokan Hilir	Orang/Kali	350.000,-
53.	Pekanbaru	Kab. Rokan Hulu	Orang/Kali	322.000,-
54.	Pekanbaru	Kab. Siak	Orang/Kali	350.000,-
55.	Pekanbaru	Kota Dumai	Orang/Kali	400.000,-
KEPULAUAN RIAU				
56.	Tanjung Pinang	Kab. Bintan	Orang/Kali	185.000,-
JAMBI				
57.	Jambi	Kab. Batanghari	Orang/Kali	175.000,-
58.	Jambi	Kab. Bungo	Orang/Kali	270.000,-
59.	Jambi	Kab. Kerinci	Orang/Kali	325.000,-
60.	Jambi	Kab. Merangin	Orang/Kali	260.000,-
61.	Jambi	Kab. Muaro Jambi	Orang/Kali	170.000,-
62.	Jambi	Kab. Sarolangun	Orang/Kali	241.000,-
63.	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	Orang/Kali	225.000,-
64.	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	Orang/Kali	190.000,-
65.	Jambi	Kab. Tebo	Orang/Kali	250.000,-
66.	Jambi	Kota Sungai Penuh	Orang/Kali	308.000,-
SUMATERA BARAT				
67.	Padang	Kab. Agam	Orang/Kali	225.000,-
68.	Padang	Kab. Dharmasraya	Orang/Kali	250.000,-
69.	Padang	Kab. Lima Puluh Kota	Orang/Kali	225.000,-
70.	Padang	Kab. Padang Pariaman	Orang/Kali	205.000,-
71.	Padang	Kab. Pasaman	Orang/Kali	250.000,-
72.	Padang	Kab. Pasaman Barat	Orang/Kali	250.000,-
73.	Padang	Kab. Pesisir Selatan	Orang/Kali	205.000,-
74.	Padang	Kab. Sijunjung	Orang/Kali	225.000,-
75.	Padang	Kab. Solok	Orang/Kali	210.000,-
76.	Padang	Kab. Solok Selatan	Orang/Kali	250.000,-
77.	Padang	Kab. Tarrah Datar	Orang/Kali	220.000,-
78.	Padang	Kota Bukit Tinggi	Orang/Kali	215.000,-
79.	Padang	Kota Padang Panjang	Orang/Kali	210.000,-
80.	Padang	Kota Pariaman	Orang/Kali	200.000,-
81.	Padang	Kota Payakumbuh	Orang/Kali	225.000,-
82.	Padang	Kota Sawahlunto	Orang/Kali	215.000,-
83.	Padang	Kota Solok	Orang/Kali	210.000,-
SUMATERA SELATAN				
84.	Palembang	Kab. Banyuasin	Orang/Kali	203.000,-
85.	Palembang	Kab. Empat Lawang	Orang/Kali	315.000,-
86.	Palembang	Kab. Lahat	Orang/Kali	250.000,-
87.	Palembang	Kab. Muara Enim	Orang/Kali	235.000,-
88.	Palembang	Kab. Musi Banyuasin	Orang/Kali	235.000,-
89.	Palembang	Kab. Musi Rawas	Orang/Kali	320.000,-
90.	Palembang	Kab. Musi Rawas Utara	Orang/Kali	325.000,-
91.	Palembang	Kab. Ogan Ilir	Orang/Kali	205.000,-
92.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ilir	Orang/Kali	205.000,-
93.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu	Orang/Kali	248.000,-
94.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	Orang/Kali	250.000,-
95.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Orang/Kali	245.000,-
96.	Palembang	Kab. Pali	Orang/Kali	265.000,-
97.	Palembang	Kota Lubuk Linggau	Orang/Kali	290.000,-
98.	Palembang	Kota Pagar Alam	Orang/Kali	280.000,-
99.	Palembang	Kota Prabumulih	Orang/Kali	205.000,-
LAMPUNG				

100.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Barat	Orang/Kali	270.000,-
101.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Selatan	Orang/Kali	234.000,-
102.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Tengah	Orang/Kali	246.000,-
103.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Timur	Orang/Kali	246.000,-
104.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Utara	Orang/Kali	252.000,-
105.	Bandar Lampung	Kab. Mesuji	Orang/Kali	276.000,-
106.	Bandar Lampung	Kab. Pesawaran	Orang/Kali	216.000,-
107.	Bandar Lampung	Kab. Pesisir Barat	Orang/Kali	200.000,-
108.	Bandar Lampung	Kab. Pringsewu	Orang/Kali	222.000,-
109.	Bandar Lampung	Kab. Tanggamus	Orang/Kali	240.000,-
110.	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang	Orang/Kali	252.000,-
111.	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat	Orang/Kali	267.000,-
112.	Bandar Lampung	Kab. Way Kanan	Orang/Kali	270.000,-
113.	Bandar Lampung	Kota Metro	Orang/Kali	234.000,-
BENGKULU				
114.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	Orang/Kali	344.000,-
115.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	Orang/Kali	232.000,-
116.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	Orang/Kali	313.000,-
117.	Bengkulu	Kab. Kaur	Orang/Kali	385.000,-
118.	Bengkulu	Kab. Kepahiang	Orang/Kali	298.000,-
119.	Bengkulu	Kab. Lebong	Orang/Kali	375.000,-
120.	Bengkulu	Kab. Mukomuko	Orang/Kali	423.000,-
121.	Bengkulu	Kab. Rejang Lebong	Orang/Kali	313.000,-
122.	Bengkulu	Kab. Seluma	Orang/Kali	282.000,-
BANGKA BELITUNG				
123.	Pangkalpinang	Kab. Bangka	Orang/Kali	250.000,-
124.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Barat	Orang/Kali	275.000,-
125.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Selatan	Orang/Kali	275.000,-
126.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Tengah	Orang/Kali	250.000,-
BANTEN				
127.	Serang	Kab. Lebak	Orang/Kali	208.000,-
128.	Serang	Kab. Pandeglang	Orang/Kali	138.000,-
129.	Serang	Kab. Serang	Orang/Kali	160.000,-
130.	Serang	Kab. Tangerang	Orang/Kali	254.000,-
131.	Serang	Kota Cilegon	Orang/Kali	160.000,-
132.	Serang	Kota Tangerang	Orang/Kali	313.000,-
133.	Serang	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	347.000,-
JAWA BARAT				
134.	Bandung	Kab. Bandung	Orang/Kali	183.000,-
135.	Bandung	Kab. Bandung Barat	Orang/Kali	275.000,-
136.	Bandung	Kab. Bekasi	Orang/Kali	265.000,-
137.	Bandung	Kab. Bogor	Orang/Kali	185.000,-
138.	Bandung	Kab. Ciamis	Orang/Kali	245.000,-
139.	Bandung	Kab. Cianjur	Orang/Kali	215.000,-
140.	Bandung	Kab. Cirebon	Orang/Kali	280.000,-
141.	Bandung	Kab. Garut	Orang/Kali	243.000,-
142.	Bandung	Kab. Indramayu	Orang/Kali	275.000,-
143.	Bandung	Kab. Karawang	Orang/Kali	248.000,-
144.	Bandung	Kab. Kuningan	Orang/Kali	275.000,-
145.	Bandung	Kab. Majalengka	Orang/Kali	235.000,-
146.	Bandung	Kab. Pangadaran	Orang/Kali	283.000,-
147.	Bandung	Kab. Purwakarta	Orang/Kali	218.000,-
148.	Bandung	Kab. Subang	Orang/Kali	208.000,-
149.	Bandung	Kab. Sukabumi	Orang/Kali	245.000,-
150.	Bandung	Kab. Sumedang	Orang/Kali	230.000,-
151.	Bandung	Kab. Tasikmalaya	Orang/Kali	245.000,-
152.	Bandung	Kota Banjar	Orang/Kali	283.000,-
153.	Bandung	Kota Bekasi	Orang/Kali	265.000,-
154.	Bandung	Kota Bogor	Orang/Kali	285.000,-
155.	Bandung	Kota Cimahi	Orang/Kali	168.000,-
156.	Bandung	Kota Cirebon	Orang/Kali	270.000,-
157.	Bandung	Kota Depok	Orang/Kali	275.000,-
158.	Bandung	Kota Sukabumi	Orang/Kali	226.000,-

159.	Bandung	Kota Tasikmalaya	Orang/Kali	245.000,-
	JAWA TENGAH			
160.	Semarang	Kab. Banjarnegara	Orang/Kali	260.000,-
161.	Semarang	Kab. Banyumas	Orang/Kali	257.000,-
162.	Semarang	Kab. Batang	Orang/Kali	240.000,-
163.	Semarang	Kab. Blora	Orang/Kali	270.000,-
164.	Semarang	Kab. Boyolali	Orang/Kali	240.000,-
165.	Semarang	Kab. Brebes	Orang/Kali	263.000,-
166.	Semarang	Kab. Cilacap	Orang/Kali	280.000,-
167.	Semarang	Kab. Demak	Orang/Kali	230.000,-
168.	Semarang	Kab. Grobogan	Orang/Kali	235.000,-
169.	Semarang	Kab. Jepara	Orang/Kali	240.000,-
170.	Semarang	Kab. Karanganyar	Orang/Kali	250.000,-
171.	Semarang	Kab. Kebumen	Orang/Kali	260.000,-
172.	Semarang	Kab. Kendal	Orang/Kali	230.000,-
173.	Semarang	Kab. Klaten	Orang/Kali	250.000,-
174.	Semarang	Kab. Kudus	Orang/Kali	235.000,-
175.	Semarang	Kab. Magelang	Orang/Kali	240.000,-
176.	Semarang	Kab. Pati	Orang/Kali	240.000,-
177.	Semarang	Kab. Pekalongan	Orang/Kali	245.000,-
178.	Semarang	Kab. Pemalang	Orang/Kali	250.000,-
179.	Semarang	Kab. Purbalingga	Orang/Kali	270.000,-
180.	Semarang	Kab. Purworejo	Orang/Kali	250.000,-
181.	Semarang	Kab. Rembang	Orang/Kali	250.000,-
182.	Semarang	Kab. Semarang	Orang/Kali	230.000,-
183.	Semarang	Kab. Sragen	Orang/Kali	250.000,-
184.	Semarang	Kab. Sukoharjo	Orang/Kali	250.000,-
185.	Semarang	Kab. Tegal	Orang/Kali	260.000,-
186.	Semarang	Kab. Temanggung	Orang/Kali	240.000,-
187.	Semarang	Kab. Wonogiri	Orang/Kali	250.000,-
188.	Semarang	Kab. Wonosobo	Orang/Kali	250.000,-
190.	Semarang	Kota Pekalongan	Orang/Kali	245.000,-
191.	Semarang	Kota Salatiga	Orang/Kali	235.000,-
192.	Semarang	Kota Surakarta	Orang/Kali	245.000,-
193.	Semarang	Kota Tegal	Orang/Kali	260.000,-
	D.I. YOGYAKARTA			
194.	Yogyakarta	Kab. Bantul	Orang/Kali	250.000,-
195.	Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	Orang/Kali	350.000,-
196.	Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	Orang/Kali	350.000,-
197.	Yogyakarta	Kab. Sleman	Orang/Kali	200.000,-
	JAWA TIMUR			
198.	Surabaya	Kab. Bangkalan	Orang/Kali	225.000,-
199.	Surabaya	Kab. Banyuwangi	Orang/Kali	285.000,-
200.	Surabaya	Kab. Blitar	Orang/Kali	255.000,-
201.	Surabaya	Kab. Bojonegoro	Orang/Kali	225.000,-
202.	Surabaya	Kab. Bondowoso	Orang/Kali	255.000,-
203.	Surabaya	Kab. Gresik	Orang/Kali	225.000,-
204.	Surabaya	Kab. Jember	Orang/Kali	261.000,-
205.	Surabaya	Kab. Jombang	Orang/Kali	235.000,-
206.	Surabaya	Kab. Kediri	Orang/Kali	235.000,-
207.	Surabaya	Kab. Lamongan	Orang/Kali	225.000,-
208.	Surabaya	Kab. Lumajang	Orang/Kali	261.000,-
209.	Surabaya	Kab. Madiun	Orang/Kali	245.000,-
210.	Surabaya	Kab. Magetan	Orang/Kali	253.000,-
211.	Surabaya	Kab. Malang	Orang/Kali	228.000,-
212.	Surabaya	Kab. Mojokerto	Orang/Kali	225.000,-
213.	Surabaya	Kab. Nganjuk	Orang/Kali	245.000,-
214.	Surabaya	Kab. Ngawi	Orang/Kali	253.000,-
215.	Surabaya	Kab. Pacitan	Orang/Kali	285.000,-
216.	Surabaya	Kab. Pamekasan	Orang/Kali	243.000,-
217.	Surabaya	Kab. Pasuruan	Orang/Kali	228.000,-
218.	Surabaya	Kab. Ponorogo	Orang/Kali	255.000,-
219.	Surabaya	Kab. Probolinggo	Orang/Kali	228.000,-

220.	Surabaya	Kab. Sampang	Orang/Kali	235.000,-
221.	Surabaya	Kab. Sidoarjo	Orang/Kali	240.000,-
222.	Surabaya	Kab. Situbondo	Orang/Kali	255.000,-
223.	Surabaya	Kab. Surnenep	Orang/Kali	255.000,-
224.	Surabaya	Kab. Trenggalek	Orang/Kali	245.000,-
225.	Surabaya	Kab. Tuban	Orang/Kali	245.000,-
226.	Surabaya	Kab. Tulungagung	Orang/Kali	245.000,-
227.	Surabaya	Kota Batu	Orang/Kali	242.000,-
228.	Surabaya	Kota Blitar	Orang/Kali	255.000,-
229.	Surabaya	Kota Bojonegoro	Orang/Kali	225.000,-
230.	Surabaya	Kota Kediri	Orang/Kali	235.000,-
231.	Surabaya	Kota Madiun	Orang/Kali	245.000,-
232.	Surabaya	Kota Malang	Orang/Kali	228.000,-
233.	Surabaya	Kota Mojokerto	Orang/Kali	225.000,-
234.	Surabaya	Kota Probolinggo	Orang/Kali	228.000,-
BALI				
235.	Denpasar	Kab. Badung	Orang/Kali	188.000,-
236.	Denpasar	Kab. Bangli	Orang/Kali	225.000,-
237.	Denpasar	Kab. Buleleng	Orang/Kali	265.000,-
238.	Denpasar	Kab. Gianyar	Orang/Kali	225.000,-
239.	Denpasar	Kab. Jernbrana	Orang/Kali	270.000,-
240.	Denpasar	Kab. Karangasem	Orang/Kali	263.000,-
241.	Denpasar	Kab. Tabanan	Orang/Kali	225.000,-
NUSA TENGGARA BARAT				
242.	Mataram	Kab. Lombok Barat	Orang/Kali	325.000,-
243.	Mataram	Kab. Lombok Tengah	Orang/Kali	450.000,-
244.	Mataram	Kab. Lombok Timur	Orang/Kali	350.000,-
NUSA TENGGARA TIMUR				
245.	Kupang	Kab. Belu	Orang/Kali	325.000,-
246.	Kupang	Kab. Kupang	Orang/Kali	175.000,-
247.	Kupang	Kab. Timar Tengah Selatan	Orang/Kali	218.000,-
248.	Kupang	Kab. Timar Tengah Utara	Orang/Kali	275.000,-
KALIMANTAN BARAT				
249.	Pontianak	Kab. Bengkayang	Orang/Kali	270.000,-
250.	Pontianak	Kab. Kapuas Hulu	Orang/Kali	550.000,-
251.	Pontianak	Kab. Kayong Utara	Orang/Kali	550.000,-
252.	Pontianak	Kab. Ketapang	Orang/Kali	550.000,-
253.	Pontianak	Kab. Kubu Raya	Orang/Kali	185.000,-
254.	Pontianak	Kab. Landak	Orang/Kali	270.000,-
255.	Pontianak	Kab. Melawi	Orang/Kali	430.000,-
256.	Pontianak	Kab. Mempawah	Orang/Kali	230.000,-
257.	Pontianak	Kab. Sambas	Orang/Kali	300.000,-
258.	Pontianak	Kab. Sanggau	Orang/Kali	303.000,-
259.	Pontianak	Kab. Sekadau	Orang/Kali	343.000,-
260.	Pontianak	Kab. Sintang	Orang/Kali	392.000,-
261.	Pontianak	Kota Singkawang	Orang/Kali	257.000,-
KALIMANTAN TENGAH				
262.	Palangkaraya	Kab. Barito Selatan	Orang/Kali	290.000,-
263.	Palangkaraya	Kab. Barito Timur	Orang/Kali	333.000,-
264.	Palangkaraya	Kab. Barito Utara	Orang/Kali	425.000,-
265.	Palangkaraya	Kab. Gunung Mas	Orang/Kali	300.000,-
266.	Palangkaraya	Kab. Kapuas	Orang/Kali	275.000,-
267.	Palangkaraya	Kab. Katingan	Orang/Kali	250.000,-
268.	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Barat	Orang/Kali	425.000,-
269.	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Timur	Orang/Kali	300.000,-
270.	Palangkaraya	Kab. Lamandau	Orang/Kali	525.000,-
271.	Palangkaraya	Kab. Murung Raya	Orang/Kali	448.000,-
272.	Palangkaraya	Kab. Pulau Pisau	Orang/Kali	250.000,-
273.	Palangkaraya	Kab. Seruyan	Orang/Kali	328.000,-
274.	Palangkaraya	Kab. Sukamara	Orang/Kali	525.000,-
KALIMANTAN SELATAN				
275.	Banjarmasin	Kab. Balangan	Orang/Kali	230.000,-
276.	Banjarmasin	Kab. Banjar	Orang/Kali	170.000,-

277.	Banjarmasin	Kab. Barito Kuala	Orang/Kali	200.000,-
278.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Selatan	Orang/Kali	200.000,-
279.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Tengah	Orang/Kali	212.000,-
280.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Utara	Orang/Kali	218.000,-
281.	Banjarmasin	Kab. Kota Baru	Orang/Kali	290.000,-
282.	Banjarmasin	Kab. Tabalong	Orang/Kali	234.000,-
283.	Banjarmasin	Kab. Tanah Bumbu	Orang/Kali	300.000,-
284.	Banjarmasin	Kab. Tanah Laut	Orang/Kali	200.000,-
285.	Banjarmasin	Kab. Tapin	Orang/Kali	189.000,-
286.	Banjarmasin	Kota Banjarbaru	Orang/Kali	225.000,-
KALIMANTAN TIMUR				
287.	Samarinda	Kab. Kutai Barat	Orang/Kali	1.500.000,-
288.	Samarinda	Kab. Kutai Kartanegara	Orang/Kali	500.000,-
289.	Samarinda	Kab. Kutai Timur	Orang/Kali	1.350.000,-
290.	Samarinda	Kab. Paser	Orang/Kali	1.650.000,-
291.	Samarinda	Kab. Penajam Paser Utara	Orang/Kali	650.000,-
292.	Samarinda	Kota Balikpapan	Orang/Kali	550.000,-
293.	Samarinda	Kota Bontang	Orang/Kali	600.000,-
SULAWESI UTARA				
294.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow	Orang/Kali	250.000,-
295.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Orang/Kali	275.000,-
296.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Timur	Orang/Kali	250.000,-
297.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Utara	Orang/Kali	300.000,-
298.	Manado	Kab. Minahasa	Orang/Kali	180.000,-
299.	Manado	Kab. Minahasa Selatan	Orang/Kali	180.000,-
300.	Manado	Kab. Minahasa Tenggara	Orang/Kali	200.000,-
301.	Manado	Kab. Minahasa Utara	Orang/Kali	175.000,-
302.	Manado	Kota Bitung	Orang/Kali	175.000,-
303.	Manado	Kota Kotamobagu	Orang/Kali	250.000,-
304.	Manado	Kota Tomohon	Orang/Kali	170.000,-
GORONTALO				
305.	Gorontalo	Kab. Boalemo	Orang/Kali	400.000,-
306.	Gorontalo	Kab. Gorontalo	Orang/Kali	300.000,-
307.	Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	Orang/Kali	350.000,-
308.	Gorontalo	Kab. Pahuwato	Orang/Kali	650.000,-
SULAWESI BARAT				
309.	Mamuju	Kab. Majene	Orang/Kali	240.000,-
310.	Mamuju	Kab. Mamasa	Orang/Kali	359.000,-
311.	Mamuju	Kab. Mamuju Tengah	Orang/Kali	200.000,-
312.	Mamuju	Kab. Pasangkayu	Orang/Kali	270.000,-
313.	Mamuju	Kab. Polewali Mandar	Orang/Kali	260.000,-
SULAWESI SELATAN				
314.	Makassar	Kab. Bantaeng	Orang/Kali	235.000,-
315.	Makassar	Kab. Barru	Orang/Kali	210.000,-
316.	Makassar	Kab. Bone	Orang/Kali	240.000,-
317.	Makassar	Kab. Bulukumba	Orang/Kali	240.000,-
318.	Makassar	Kab. Enrekang	Orang/Kali	250.000,-
319.	Makassar	Kab. Gowa	Orang/Kali	175.000,-
320.	Makassar	Kab. Jeneponto	Orang/Kali	230.000,-
321.	Makassar	Kab. Luwu	Orang/Kali	350.000,-
322.	Makassar	Kab. Luwu Timur	Orang/Kali	375.000,-
323.	Makassar	Kab. Luwu Utara	Orang/Kali	365.000,-
324.	Makassar	Kab. Maros	Orang/Kali	170.000,-
325.	Makassar	Kab. Pinrang	Orang/Kali	230.000,-
326.	Makassar	Kab. Sidenreng Rappang	Orang/Kali	230.000,-
327.	Makassar	Kab. Sinjai	Orang/Kali	235.000,-
328.	Makassar	Kab. Soppeng	Orang/Kali	235.000,-
329.	Makassar	Kab. Takalar	Orang/Kali	190.000,-
330.	Makassar	Kab. Tanatoraja	Orang/Kali	350.000,-
331.	Makassar	Kab. Toraja Utara	Orang/Kali	350.000,-
332.	Makassar	Kab. Wajo	Orang/Kali	230.000,-
333.	Makassar	Kota Palopo	Orang/Kali	350.000,-
334.	Makassar	Kota Pare-Pare	Orang/Kali	225.000,-

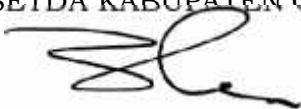
	SULAWESI TENGAH			
335.	Palu	Kab. Luwuk	Orang/Kali	400.000,-
336.	Palu	Kab. Buol	Orang/Kali	472.000,-
337.	Palu	Kab. Donggala	Orang/Kali	130.000,-
338.	Palu	Kab. Morowali	Orang/Kali	400.000,-
340.	Palu	Kab. Parigi Moutong	Orang/Kali	250.000,-
341.	Palu	Kab. Poso	Orang/Kali	280.000,-
342.	Palu	Kab. Sigi	Orang/Kali	219.000,-
343.	Palu	Kab. Tojouna-Una	Orang/Kali	350.000,-
344.	Palu	Kab. Toli-Toli	Orang/Kali	412.000,-
	SULAWESI TENGGARA			
345.	Kendari	Kab. Bombana	Orang/Kali	355.000,-
346.	Kendari	Kab. Kolaka	Orang/Kali	370.000,-
347.	Kendari	Kab. Kolaka Timur	Orang/Kali	300.000,-
348.	Kendari	Kab. Kolaka Utara	Orang/Kali	425.000,-
349.	Kendari	Kab. Konawe	Orang/Kali	300.000,-
350.	Kendari	Kab. Konawe Selatan	Orang/Kali	305.000,-
351.	Kendari	Kab. Konawe Utara	Orang/Kali	300.000,-
	MALUKU UTARA			
352.	Sofifi	Kab. Halmahera Barat	Orang/Kali	850.000,-
353.	Sofifi	Kab. Halmahera Tengah	Orang/Kali	1.000.000,-
354.	Sofifi	Kab. Halmahera Timur	Orang/Kali	1.250.000,-
355.	Sofifi	Kab. Halmahera Utara	Orang/Kali	900.000,-
	PAPUA			
356.	Jayapura	Kab. Jayapura	Orang/Kali	600.000,-
357.	Jayapura	Kab. Keerom	Orang/Kali	900.000,-
358.	Jayapura	Kab. Sarmi	Orang/Kali	2.700.000,-
	PAPUA BARAT			
359.	Manokwari	Kab. Teluk Bintuni	Orang/Kali	900.000,-
360.	Manokwari	Kab. Manokwari Selatan	Orang/Kali	750.000,-
361.	Manokwari	Kab. Pegunungan Arfak	Orang/Kali	2.650.000,-

Pj. BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.

TEDDY MEILWANSYAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OKU,



EKA MEIRWANZA, SH.MM
PENATA TINGKAT I (III/d)
NIP. 197705012009031002

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
 NOMOR 20 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22
 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA
 PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

**SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI
 PULANG (PP)**

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS (Rp)	EKONOMI (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	JAKARTA	AMBON	13.285.000,-	7.081.000,-
2.	JAKARTA	BALIKPAPAN	7.412.000,-	3.797.000,-
3.	JAKARTA	BANDA ACEH	7.519.000,-	4.492.000,-
4.	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	2.407.000,-	1.583.000,-
5.	JAKARTA	BANJARMASIN	5.252.000,-	2.995.000,-
6.	JAKARTA	BATAM	4.867.000,-	2.888.000,-
7.	JAKARTA	BENGKULU	4.364.000,-	2.621.000,-
8.	JAKARTA	BIAK	14.005.000,-	7.519.000,-
9.	JAKARTA	DENPASAR	5.305.000,-	3.262.000,-
10.	JAKARTA	GORONTALO	7.231.000,-	4.824.000,-
11.	JAKARTA	JAMBI	4.005.000,-	2.460.000,-
12.	JAKARTA	JAYAPURA	14.568.000,-	8.193.000,-
13.	JAKARTA	YOGYAKARTA	4.107.000,-	2.268.000,-
14.	JAKARTA	KENDARI	7.658.000,-	4.182.000,-
15.	JAKARTA	KUPANG	9.413.000,-	5.081.000,-
16.	JAKARTA	MAKASSAR	7.444.000,-	3.829.000,-
17.	JAKARTA	MALANG	4.599.000,-	2.695.000,-
18.	JAKARTA	MAMUJU	7.295.000,-	4.867.000,-
19.	JAKARTA	MANADO	10.824.000,-	5.102.000,-
20.	JAKARTA	MANOKWARI	16.226.000,-	10.824.000,-
21.	JAKARTA	MATARAM	5.310.000,-	3.230.000,-
22.	JAKARTA	MEDAN	7.252.000,-	3.808.000,-
23.	JAKARTA	PADANG	5.530.000,-	2.952.000,-
24.	JAKARTA	PALANGKARAYA	4.984.000,-	2.984.000,-
25.	JAKARTA	PALEMBANG	3.861.000,-	2.268.000,-
26.	JAKARTA	PALU	9.348.000,-	5.113.000,-
27.	JAKARTA	PANGKAL PINANG	3.412.000,-	2.139.000,-
28.	JAKARTA	PEKANBARU	5.583.000,-	3.010.000,-
29.	JAKARTA	PONTIANAK	4.353.000,-	2.781.000,-
30.	JAKARTA	SEMARANG	3.861.000,-	2.182.000,-
31.	JAKARTA	SOLO	3.861.000,-	2.342.000,-
32.	JAKARTA	SURABAYA	5.466.000,-	2.674.000,-
33.	JAKARTA	TERNATE	10.001.000,-	6.664.000,-

34.	JAKARTA	TIMIKA	13.830.000,-	7.487.000,-
35.	JAKARTA	TANJUNG SELOR	7.424.000,-	4.057.000,-
36.	AMBON	DENPASAR	8.054.000,-	4.471.000,-
37.	AMBON	JAYAPURA	7.434.000,-	4.161.000,-
38.	AMBON	KENDARI	4.824.000,-	2.856.000,-
39.	AMBON	MAKASSAR	6.022.000,-	3.455.000,-
40.	AMBON	MANOKWARI	5.177.000,-	3.027.000,-
41.	AMBON	PALU	6.140.000,-	3.508.000,-
42.	AMBON	SORONG	3.637.000,-	2.257.000,-
43.	AMBON	SURABAYA	8.803.000,-	4.845.000,-
44.	AMBON	TERNATE	4.022.000,-	2.449.000,-
45.	BALIKPAPAN	BANDA ACEH	12.739.000,-	6.749.000,-
46.	BALIKPAPAN	BATAM	10.354.000,-	5.305.000,-
4T.	BALIKPAPAN	DENPASAR	10.739.000,-	5.648.000,-
48.	BALIKPAPAN	JAYAPURA	19.071.000,-	10.086.000,-
49.	BALIKPAPAN	YOGYAKARTA	9.669.000,-	4.749.000,-
50.	BALIKPAPAN	MAKASSAR	12.064.000,-	6.150.000,-
51.	BALIKPAPAN	MANADO	15.702.000,-	7.295.000,-
52.	BALIKPAPAN	MEDAN	12.493.000,-	6.140.000,-
53.	BALIKPAPAN	PADANG	10.942.000,-	5.369.000,-
54.	BALIKPAPAN	PALEMBANG	9.445.000,-	4.749.000,-
55.	BALIKPAPAN	PEKANBARU	10.996.000,-	5.423.000,-
56.	BALIKPAPAN	SEMARANG	9.445.000,-	4.074.000,-
57.	BALIKPAPAN	SOLO	9.445.000,-	4.813.000,-
58.	BALIKPAPAN	SURABAYA	10.889.000,-	5.113.000,-
59.	BALIKPAPAN	TIMIKA	18.408.000,-	9.445.000,-
60.	BANDA ACEH	DENPASAR	10.835.000,-	6.279.000,-
61.	BANDA ACEH	JAYAPURA	19.167.000,-	10.717.000,-
62.	BANDA ACEH	YOGYAKARTA	9.765.000,-	5.380.000,-
63.	BANDA ACEH	MAKASSAR	12.760.000,-	6.781.000,-
64.	BANDA ACEH	MANADO	15.798.000,-	7.926.000,-
65.	BANDA ACEH	PONTIANAK	9.990.000,-	5.840.000,-
66.	BANDA ACEH	SEMARANG	9.530.000,-	5.305.000,-
67.	BANDA ACEH	SOLO	9.530.000,-	5.444.000,-
68.	BANDA ACEH	SURABAYA	10.985.000,-	5.744.000,-
69.	BANDA ACEH	TIMIKA	18.504.000,-	10.076.000,-
70.	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	8.129.000,-	4.129.000,-
71.	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	8.225.000,-	4.760.000,-
72.	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	6.193.000,-	3.412.000,-
73.	BANDAR LAMPUNG	BATAM	5.840.000,-	3.310.000,-
74.	BANDAR LAMPUNG	BIAK	14.119.000,-	7.487.000,-
75.	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	6.236.000,-	3.647.000,-
70.	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	14.568.000,-	8.097.000,-
77.	BANDAR LAMPUNG	YOGYAKARTA	5.155.000,-	2.760.000,-
78.	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	8.354.000,-	4.482.000,-
79.	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	8.161.000,-	4.161.000,-
80.	BANDAR LAMPUNG	MALANG	5.594.000,-	3.134.000,-

81.	BANDAR LAMPUNG	MANADO	11.199.000,-	5.305.000,-
82.	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	6.246.000,-	3.626.000,-
83.	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	7.979.000,-	4.150.000,-
84.	BANDAR LAMPUNG	PADANG	6.439.000,-	3.380.000,-
85.	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	5.947.000,-	3.401.000,-
86.	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	4.931.000,-	2.760.000,-
87.	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	6.482.000,-	3.433.000,-
88.	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	5.380.000,-	3.220.000,-
89.	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	4.931.000,-	2.685.000,-
90.	BANDAR LAMPUNG	SOLO	4.931.000,-	2.824.000,-
91.	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	6.386.000,-	3.123.000,-
92.	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	13.905.000,-	7.455.000,-
93.	BANDUNG	BATAM	6.289.000,-	3.583.000,-
94.	BANDUNG	DENPASAR	5.620.000,-	3.252.000,-
95.	BANDUNG	JAMBI	5.006.000,-	2.941.000,-
96.	BANDUNG	YOGYAKARTA	3.369.000,-	2.129.000,-
97.	BANDUNG	PADANG	6.129.000,-	3.508.000,-
98.	BANDUNG	PALEMBANG	4.385.000,-	2.631.000,-
99.	BANDUNG	PANGKAL PINANG	4.599.000, -	2.738.000,-
100.	BANDUNG	PEKANBARU	6.525.000,-	3.701.000,-
101.	BANDUNG	SEMARANG	3.027.000,-	1.957.000,-
102.	BANDUNG	SOLO	3.647.000,-	2.268.000,-
103.	BANDUNG	SURABAYA	4.824.000,-	2.856.000,-
104.	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	4.439.000,-	2.663.000,-
105.	BANJARMASIN	BANDA ACEH	10.792.000,-	6.022.000,-
106.	BANJARMASIN	BATAM	8.407.000,-	4.578.000,-
107.	BANJARMASIN	BIAK	16.686.000,-	8.749.000,-
108.	BANJARMASIN	DENPASAR	8.792.000,-	4.920.000,-
109.	BANJARMASIN	JAYAPURA	17.135.000,-	9.359.000,-
110.	BANJARMASIN	YOGYAKARTA	7.723.000,-	4.022.000,-
111.	BANJARMASIN	MEDAN	10.546.000,-	5.412.000,-
112.	BANJARMASIN	PADANG	9.006.000,-	4.642.000,-
113.	BANJARMASIN	PALEMBANG	7.498.000,-	4.022.000,-
114.	BANJARMASIN	PEKANBARU	9.049.000,-	4.696.000,-
115.	BANJARMASIN	SEMARANG	7.498.000,-	3.958.000,-
116.	BANJARMASIN	SOLO	7.498.000,-	4.097.000,-
117.	BANJARMASIN	SURABAYA	8.942.000,-	4.385.000,-
118.	BANJARMASIN	TIMIKA	16.472.000,-	8.717.000,-
119.	BATAM	BANDA ACEH	10.439.000,-	5.936.000,-
120.	BATAM	DENPASAR	8.450.000,-	4.824.000,-
121.	BATAM	JAYAPURA	16.782.000,-	9.263.000,-
122.	BATAM	YOGYAKARTA	7.370.000,-	3.936.000,-
123.	BATAM	MAKASSAR	10.375.000,-	5.337.000,-
124.	BATAM	MANADO	13.413.000,-	6.482.000,-
125.	BATAM	MEDAN	10.193.000,-	5.316.000,-
126.	BATAM	PADANG	8.653.000,-	4.546.000,-
127.	BATAM	PALEMBANG	7.145.000,-	3.936.000,-

128.	BATAM	PEKANBARU	8.707.000,-	4.599.000,-
129.	BATAM	PONTIANAK	7.594.000,-	4.396.000,-
130.	BATAM	SEMARANG	7.145.000,-	3.861.000,-
131.	BATAM	SOLO	7.145.000,-	4.000.000,-
132.	BATAM	SURABAYA	8.000.000,-	4.300.000,-
133.	BATAM	TIMIKA	16.119.000,-	8.021.000,-
134.	BENGKULU	PALEMBANG	2.899.000,-	1.893.000,-
135.	BIAK	BALIKPAPAN	18.622.000,-	9.477.000,-
136.	BIAK	BANDA ACEH	18.718.000,-	10.108.000,-
137.	BIAK	BATAM	16.333.000,-	8.664.000,-
138.	BIAK	DENPASAR	10.729.000,-	8.995.000,-
139.	BIAK	JAYAPURA	3.615.000,-	2.321.000,-
140.	BIAK	YOGYAKARTA	15.048.000,-	8.108.000,-
141.	BIAK	MANADO	11.734.000,-	6.353.000,-
142.	BIAK	MEDAN	18.472.000,-	9.498.000,-
143.	BIAK	PADANG	16.932.000,-	8.728.000,-
144.	BIAK	PALEMBANG	15.424.000,-	8.108.000,-
145.	BIAK	PEKANBARU	16.985.000,-	8.781.000,-
146.	BIAK	PONTIANAK	15.873.000,-	8.508.000,-
147.	BIAK	SURABAYA	12.782.000,-	7.081.000,-
148.	BIAK	TIMIKA	5.808.000,-	3.444.000,-
149.	DENPASAR	JAYAPURA	11.680.000,-	6.845.000,-
150.	DENPASAR	KUPANG	5.091.000,-	2.952.000,-
151.	DENPASAR	MAKASSAR	4.182.000,-	2.631.000,-
152.	DENPASAR	MANADO	7.851.000,-	4.278.000,-
153.	DENPASAR	MATARAM	1.840.000,-	1.390.000,-
154.	DENPASAR	MEDAN	10.589.000,-	5.658.000,-
155.	DENPASAR	PADANG	9.049.000,-	4.888.000,-
156.	DENPASAR	PALANGKARAYA	8.557.000,-	4.909.000,-
157.	DENPASAR	PALEMBANG	7.541.000,-	4.278.000,-
158.	DENPASAR	PEKANBARU	9.092.000,-	4.942.000,-
159.	DENPASAR	PONTIANAK	7.990.000,-	4.738.000,-
160.	DENPASAR	TIMIKA	10.140.000,-	6.129.000,-
161.	JAMBI	BALIKPAPAN	7.733.000,-	4.407.000,-
162.	JAMBI	BANJARMASIN	7.690.000,-	4.193.000,-
163.	JAMBI	DENPASAR	7.733.000,-	4.439.000,-
164.	JAMBI	YOGYAKARTA	6.653.000,-	3.551.000,-
165.	JAMBI	KUPANG	11.434.000,-	6.075.000,-
166.	JAMBI	MAKASSAR	9.659.000,-	4.952.000,-
167.	JAMBI	MALANG	7.091.000,-	3.925.000,-
168.	JAMBI	MANADO	12.707.000,-	6.097.000,-
169.	JAMBI	PALANGKARAYA	7.444.000,-	4.193.000,-
170.	JAMBI	PONTIANAK	6.878.000,-	4.011.000,-
171.	JAMBI	SEMARANG	6.428.000,-	3.476.000,-
172.	JAMBI	SOLO	6.428.000,-	3.615.000,-
173.	JAMBI	SURABAYA	7.883.000,-	3.915.000,-
174.	JAYAPURA	YOGYAKARTA	13.274.000,-	7.690.000,-

175.	JAYAPURA	MANADO	22.109.000,-	11.203.000,-
170.	JAYAPURA	MEDAN	18.932.000,-	10.097.000,-
177.	JAYAPURA	PADANG	17.381.000,-	9.327.000,-
178.	JAYAPURA	PALEMBANG	15.873.000,-	8.717.000,-
179.	JAYAPURA	PEKANBARU	17.435.000,-	9.380.000,-
180.	JAYAPURA	PONTIANAK	16.322.000,-	9.177.000,-
181.	JAYAPURA	TIMIKA	3.615.000,-	2.289.000,-
182.	YOGYAKARTA	DENPASAR	3.861.000,-	2.481.000,-
183.	YOGYAKARTA	MAKASSAR	6.525.000,-	3.893.000,-
184.	YOGYAKARTA	MANADO	10.536.000,-	5.722.000,-
185.	YOGYAKARTA	MEDAN	9.519.000,-	4.770.000,-
186.	YOGYAKARTA	PADANG	7.969.000,-	4.000.000,-
187.	YOGYAKARTA	PALEMBANG	6.460.000,-	3.380.000,-
188.	YOGYAKARTA	PEKANBARU	8.022.000,-	4.054.000,-
189.	YOGYAKARTA	PONTIANAK	6.910.000,-	3.840.000,-
190.	YOGYAKARTA	TIMIKA	11.894.000,-	7.038.000,-
191.	KENDARI	BANDA ACEH	12.953.000,-	7.102.000,-
192.	KENDARI	BATAM	10.568.000,-	5.658.000,-
193.	KENDARI	DENPASAR	5.455.000,-	3.273.000,-
194.	KENDARI	YOGYAKARTA	8.129.000,-	4.706.000,-
195.	KENDARI	PADANG	11.167.000,-	5.722.000,-
196.	KENDARI	PALEMBANG	9.659.000,-	5.102.000,-
197.	KENDARI	PEKANBARU	11.220.000,-	5.776.000,-
198.	KENDARI	SEMARANG	9.659.000,-	5.027.000,-
199.	KENDARI	SOLO	9.659.000,-	5.166.000,-
200.	KENDARI	SURABAYA	11.103.000,-	5.466.000,-
201.	KENDARI	TIMIKA	18.633.000,-	9.798.000,-
202.	KUPANG	JAYAPURA	14.380.000,-	8.108.000,-
203.	KUPANG	YOGYAKARTA	7.348.000,-	4.182.000,-
204.	KUPANG	MAKASSAR	7.037.000,-	4.311.000,-
205.	KUPANG	MANADO	11.648.000,-	6.140.000,-
206.	KUPANG	SURABAYA	6.749.000,-	3.722.000,-
207.	MAKASSAR	BIAK	8.493.000,-	4.931.000,-
208.	MAKASSAR	JAYAPURA	10.193.000,-	5.787.000,-
209.	MAKASSAR	KENDARI	2.663.000,-	1.786.000,-
210.	MAKASSAR	MANADO	5.327.000,-	2.909.000,-
211.	MAKASSAR	TIMIKA	11.723.000,-	6.567.000,-
212.	MALANG	BALIKPAPAN	10.108.000,-	5.134.000,-
213.	MALANG	BANDA ACEH	10.204.000,-	5.705.000,-
214.	MALANG	BANJARMASIN	8.161.000,-	4.407.000,-
215.	MALANG	BATAM	7.819.000,-	4.311.000,-
216.	MALANG	BIAK	16.087.000,-	8.482.000,-
217.	MALANG	JAYAPURA	16.536.000,-	9.092.000,-
218.	MALANG	KENDARI	10.322.000,-	5.487.000,-
219.	MALANG	MAKASSAR	10.129.000,-	5.166.000,-
220.	MALANG	MANADO	13.167.000,-	6.311.000,-
221.	MALANG	MEDAN	9.958.000,-	5.145.000,-

222.	MALANG	PADANG	8.418.000,-	4.385.000,-
223.	MALANG	PALANGKARAYA	7.915.000,-	4.407.000,-
224.	MALANG	PALEMBANG	6.899.000,-	3.705.000,-
225.	MALANG	PEKANBARU	8.461.000,-	4.439.000,-
226.	MALANG	TIMIKA	15.873.000,-	8.461.000,-
227.	MANADO	MEDAN	15.552.000,-	7.316.000,-
228.	MANADO	PADANG	14.012.000,-	6.540.000,-
229.	MANADO	PALEMBANG	12.504.000,-	5.926.000,-
230.	MANADO	PEKANBARU	14.055.000,-	6.599.000,-
231.	MANADO	PONTIANAK	12.953.000,-	6.396.000,-
232.	MANADO	SEMARANG	12.504.000,-	5.851.000,-
233.	MANADO	SOLO	12.504.000,-	5.990.000,-
234.	MANADO	SURABAYA	9.937.000,-	5.262.000,-
235.	MANADO	TIMIKA	16.183.000,-	8.995.000,-
236.	MATARAM	BALIKPAPAN	10.750.000,-	5.615.000,-
237.	MATARAM	BANDA ACEH	10.840.000,-	6.246.000,-
238.	MATARAM	BANJARMASIN	8.803.000,-	4.888.000,-
239.	MATARAM	BATAM	8.461.000,-	4.803.000,-
240.	MATARAM	BIAK	11.552.000,-	6.540.000,-
241.	MATARAM	JAYAPURA	13.092.000,-	7.327.000,-
242.	MATARAM	YOGYAKARTA	4.417.000,-	2.781.000,-
243.	MATARAM	MAKASSAR	4.717.000,-	2.909.000,-
244.	MATARAM	MANADO	8.717.000,-	4.738.000,-
245.	MATARAM	MEDAN	10.000.000,-	5.037.000,-
246.	MATARAM	PADANG	9.060.000,-	4.807.000,-
247.	MATARAM	PALEMBANG	7.551.000,-	4.240.000,-
248.	MATARAM	PEKANBARU	9.102.000,-	4.909.000,-
249.	MATARAM	PONTIANAK	8.001.000,-	4.706.000,-
250.	MATARAM	SURABAYA	3.829.000,-	2.32 1.000,-
251.	MEDAN	BANDA ACEH	3.466.000,-	2.193.000,-
252.	MEDAN	MAKASSAR	12.514.000,-	6.172.000,-
253.	MEDAN	PONTIANAK	9.733.000,-	5.230.000,-
254.	MEDAN	SEMARANG	9.284.000,-	4.696.000,-
255.	MEDAN	SOLO	9.284.000,-	4.835.000,-
256.	MEDAN	SURABAYA	10.739.000,-	5.134.000,-
257.	MEDAN	TIMIKA	18.258.000,-	9.455.000,-
258.	PADANG	MAKASSAR	10.974.000,-	5.402.000,-
259.	PADANG	PONTIANAK	8.193.000,-	4.400.000,-
260.	PADANG	SEMARANG	7.744.000,-	3.925.000,-
261.	PADANG	SOLO	7.744.000,-	4.065.000,-
262.	PADANG	SURABAYA	9.199.000,-	4.364.000,-
263.	PADANG	TIMIKA	10.718.000,-	8.085.000,-
264.	PALANGKARAYA	BANDA ACEH	10.546.000,-	6.022.000,-
265.	PALANGKARAYA	BATAM	8.161.000,-	4.578.000,-
266.	PALANGKARAYA	YOGYAKARTA	7.477.000,-	4.022.000,-
267.	PALANGKARAYA	MATARAM	8.557.000,-	4.888.000,-
268.	PALANGKARAYA	MEDAN	10.300.000,-	5.412.000,-

269.	PALANGKARAYA	PADANG	8.700.000,-	4.642.000,-
270.	PALANGKARAYA	PALEMBANG	7.252.000,-	4.022.000,-
271.	PALANGKARAYA	PEKANBARU	8.803.000,-	4.096.000,-
272.	PALANGKARAYA	SEMARANG	7.252.000,-	3.947.000,-
273.	PALANGKARAYA	SOLO	7.252.000,-	4.086.000,-
274.	PALANGKARAYA	SURABAYA	8.696.000,-	4.385.000,-
275.	PALEMBANG	BALIKPAPAN	9.894.000,-	5.220.000,-
276.	PALEMBANG	MAKASSAR	9.466.000,-	4.781.000,-
277.	PALEMBANG	PONTIANAK	6.685.000,-	3.840.000,-
278.	PALEMBANG	SEMARANG	6.236.000,-	3.305.000,-
279.	PALEMBANG	SOLO	6.23h.000,-	3.444.000,-
280.	PALEMBANG	SURABAYA	7.690.000,-	3.744.000,-
281.	PALEMBANG	TIMIKA	15.210.000,-	8.076.000,-
282.	PALU	MAKASSAR	4.208.000,-	2.578.000,-
283.	PALU	POSO	1.957.000,-	1.423.000,-
284.	PALU	SORONG	6.878.000,-	3.883.000,-
285.	PALU	SURABAYA	6.878.000,-	3.883.000,-
286.	PALU	TOLI-TOLI	2.941.000,-	1.915.000,-
287.	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	9.038.000,-	4.631.000,-
288.	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	7.091.000,-	3.915.000,-
289.	PANGKAL PINANG	BATAM	6.739.000,-	3.818.000,-
290.	PANGKAL PINANG	YOGYAKARTA	6.065.000,-	3.262.000,-
291.	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	9.060.000,-	4.663.000,-
292.	PANGKAL PINANG	MANADO	12.097.000,-	5.808.000,-
293.	PANGKAL PINANG	MEDAN	8.888.000,-	4.653.000,-
294.	PANGKAL PINANG	PADANG	7.337.000,-	3.883.000,-
295.	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	5.829.000,-	3.262.000,-
296.	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	7.391.000,-	3.936.000,-
297.	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	6.279.000,-	3.733.000,-
298.	PANGKAL PINANG	SEMARANG	5.829.000,-	3.187.000,-
299.	PANGKAL PINANG	SOLO	5.829.000,-	3.320.000,-
300.	PANGKAL PINANG	SURABAYA	7.284.000,-	3.626.000,-
301.	PEKANBARU	PONTIANAK	8.247.000,-	4.514.000,-
302.	PEKANBARU	SEMARANG	7.797.000,-	3.979.000,-
303.	PEKANBARU	SOLO	7.797.000,-	4.118.000,-
304.	PEKANBARU	SURABAYA	9.241.000,-	4.407.000,-
305.	PEKANBARU	TIMIKA	16.771.000,-	8.739.000,-
306.	PONTIANAK	MAKASSAR	9.915.000,-	5.241.000,-
307.	PONTIANAK	SEMARANG	6.685.000,-	3.705.000,-
308.	PONTIANAK	SOLO	6.685.000,-	3.904.000,-
309.	PONTIANAK	SURABAYA	8.140.000,-	4.204.000,-
310.	PONTIANAK	TIMIKA	15.659.000,-	8.535.000,-
311.	SEMARANG	MAKASSAR	9.466.000,-	4.706.000,-
312.	SOLO	MAKASSAR	9.466.000,-	4.845.000,-
313.	SURABAYA	DENPASAR	3.198.000,-	1.979.000,-
314.	SURABAYA	JAYAPURA	12.075.000,-	7.231.000,-
315.	SURABAYA	MAKASSAR	5.936.000,-	3.433.000,-

316.	SURABAYA	TIMIKA	11.295.000,-	6.589.000,-
------	----------	--------	--------------	-------------

Pj. BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.

TEDDY MEILWANSYAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OKU,



EKA MEIRWANZA, SH.MM
PENATA TINGKAT I (III/d)
NIP. 197705012009031002

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 20 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22
TAHUN 2022 TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA
PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

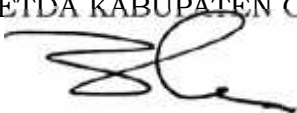
SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
(dari tempat kedudukan (hotel/travel) menuju Bandara/Pelabuhan/terminal/Stasiun keberangkatan atau dari Bandara/Pelabuhan/terminal/Stasiun kedatangan menuju tempat tujuan dikota Bandara/Pelabuhan/terminal/Stasiun kedatangan dan sebaliknya)

NO.	PROVINSI	SATUAN	BIAYA TAHUN ANGGARAN 2023
1	2	3	4
1	ACEH	Orang/Kali	127.000,-
2	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	308.000,-
3	RIAU	Orang/Kali	101.000,-
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	165.000,-
5	JAMBI	Orang/Kali	147.000,-
6	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	190.000,-
7	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	179.000,-
8	LAMPUNG	Orang/Kali	168.000,-
9	BENGKULU	Orang/Kali	109.000,-
10	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	97.000,-
11	BANTEN	Orang/Kali	536.000,-
12	JAWA BARAT	Orang/Kali	200.000,-
13	D.K.I JAKARTA	Orang/Kali	256.000,-
14	JAWA TENGAH	Orang/Kali	108.000,-
15	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	267.000,-
16	JAWA TIMUR	Orang/Kali	233.000,-
17	BALI	Orang/Kali	227.000,-
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	231.000,-
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	116.000,-
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	171.000,-
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	134.000,-
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	180.000,-
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	533.000,-
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	218.000,-
25	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	138.000,-
26	GORONTALO	Orang/Kali	265.000,-
27	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	313.000,-
28	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	187.000,-
29	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	165.000,-
30	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	171.000,-
31	MALUKU	Orang/Kali	288.000,-
32	MALUKU UTARA	Orang/Kali	215.000,-
33	PAPUA	Orang/Kali	513.000,-
34	PAPUA BARAT	Orang/Kali	236.000,-

Pj. BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OKU,



EKA MEIRWANZA, SH.MM
PENATA TINGKAT I (III/d)
NIP. 197705012009031002

TEDDY MEILWANSYAH

LAMPIRAN IX
 PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
 NOMOR 20 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22
 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA
 PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

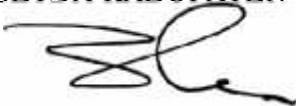
SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN

NO	PROVINSI	SATUAN	RODA 4 (Rp)	RODA 6/BUS SEDANG (Rp)	RODA 6/BUS BESAR (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	Per Hari	930.000,-	3.282.000,-	4.638.000,-
2.	SUMATERA UTARA	Per Hari	1.220.000,-	2.890.000,-	3.475.000,-
3.	RIAU	Per Hari	978.000,-	3.155.000,-	4.585.000,-
4.	KEPULAUAN RIAU	Per Hari	979.000,-	2.373.000,-	3.910.000,-
5.	JAMBI	Per Hari	1.005.000,-	5.585.000,-	7.190.000,-
6.	SUMATERA BARAT	Per Hari	922.000,-	2.124.000,-	3.500.000,-
7.	SUMATERA SELATAN	Per Hari	1.507.000,-	2.200.000,-	4.097.000,-
8.	LAMPUNG	Per Hari	846.000,-	3.594.000,-	5.052.000,-
9.	BENGKULU	Per Hari	985.000,-	4.763.000,-	6.449.000,-
10.	BANGKA BELITUNG	Per Hari	1.258.000,-	3.477.000,-	5.342.000,-
11.	BANTEN	Per Hari	972.000,-	2.801.000,-	4.120.000,-
12.	JAWA BARAT	Per Hari	932.000,-	2.563.000,-	3.519.000,-
13.	D.K.I. JAKARTA	Per Hari	1.139.000,-	2.459.000,-	3.439.000,-
14.	JAWA TENGAH	Per Hari	1.270.000,-	2.675.000,-	4.237.000,-
15.	D.I.YOGYAKARTA	Per Hari	905.000,-	2.247.000,-	3.565.000,-
16.	JAWA TIMUR	Per Hari	1.171.000,-	2.446.000,-	3.303.000,-
17.	BALI	Per Hari	1.157.000,-	3.174.000,-	3.911.000,-
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Per Hari	1.103.000,-	2.532.000,-	3.369.000,-
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Per Hari	857.000,-	3.059.000,-	3.468.000,-
20.	KALIMANTAN BARAT	Per Hari	868.000,-	3.471.000,-	4.573.000,-
21.	KALIMANTAN TENGAH	Per Hari	1.177.000,-	4.645.000,-	6.706.000,-
22.	KALIMANTAN SELATAN	Per Hari	837.000,-	2.630.000,-	3.550.000,-
23.	KALIMANTAN TIMUR	Per Hari	1.100.000,-	3.112.000,-	4.829.000,-
24.	KALIMANTAN UTARA	Per Hari	1.100.000,-	2.713.000,-	4.829.000,-
25.	SULAWESI UTARA	Per Hari	1.195.000,-	2.498.000,-	3.845.000,-
26.	GORONTALO	Per Hari	792.000,-	2.504.000,-	4.038.000,-
27.	SULAWESI BARAT	Per Hari	880.000,-	3.080.000,-	3.282.000,-
28.	SULAWESI SELATAN	Per Hari	938.000,-	3.385.000,-	4.293.000,-
29.	SULAWESI TENGAH	Per Hari	824.000,-	2.423.000,-	4.212.000,-
30.	SULAWESI TENGGARA	Per Hari	945.000,-	2.609.000,-	5.150.000,-
31.	MALUKU	Per Hari	1.149.000,-	3.590.000,-	4.021.000,-
32.	MALUKU UTARA	Per Hari	1.061.000,-	3.013.000,-	4.170.000,-
33.	PAPUA	Per Hari	1.114.000,-	4.082.000,-	5.248.000,-
34.	PAPUA BARAT	Per Hari	1.171.000,-	3.499.000,-	4.547.000,-
35.	PAPUA BARAT DAYA	Per Hari	1.171.000,-	3.499.000,-	4.547.000,-
36.	PAPUA TENGAH	Per Hari	1.114.000,-	4.082.000,-	5.248.000,-
37.	PAPUA SELATAN	Per Hari	1.638.000,-	6.001.000,-	7.715.000,-
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	Per Hari	1.649.000,-	6.041.000,-	7.767.000,-

Pj. BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA KABUPATEN OKU,



EKA MEIRWANZA, SH.MM
 PENATA TINGKAT I (III/d)
 NIP. 197705012009031002

TEDDY MEILWANSYAH

LAMPIRAN XI
 PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
 NOMOR 20 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22
 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA
 PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU



KOP NASKAH DINAS
 PERANGKAT DAERAH

Lembar ke

:

.....

Kode No.

:

.....

Nomor

:

.....

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

1	Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran		
2	Nama / NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas		
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan / Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.	
4	Maksud Perjalanan Dinas		
5	Alat angkut yang dipergunakan		
6	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. b.	
7	a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru *)	a. b. c.	
8	Pengikut: Nama 1 2 3 4 5	Tanggal Lahir	Keterangan
9	Pembebanan Anggaran a. SKPD b. Kode Rekening	a b	
10	Keterangan lain-lain		

*Coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di

Tanggal

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

(.....)

NIP.

	I. Berangkat dari : (Tempat Kedudukan) Ke : Pada tanggal : Kepala Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (.....) NIP.
II. Tiba di Pada tanggal Kepala (.....) Nip.	Tiba di : Pada tanggal : Kepala : (.....) Nip.
III. Tiba di Pada tanggal Kepala (.....) Nip.	Tiba di : Pada tanggal : Kepala : (.....) Nip.
IV. Tiba di Pada tanggal Kepala (.....) Nip.	Tiba di : Pada tanggal : Kepala : (.....) Nip.
V. Tiba di Pada tanggal Kepala (.....) Nip.	Tiba di : Pada tanggal : Kepala : (.....) Nip.
VI. Tiba di : Pada tanggal : Kepala : (.....) NIP.	Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut di atas perintahnya dan semata-mata untuk dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
VII. Catatan Lain-lain	

VIII. PERHATIAN :
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menerbitkan SPD, pejabat/pegawai/pihak lain yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal keberangkatan/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Daerah apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 20 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22
TAHUN 2022 TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA
PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU



KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

PAKTA INTEGRITAS

PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
NIK :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan :

- 1) bahwa saya akan melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai dengan Surat Tugas nomor Tanggal dalam rangka melaksanakan kegiatan ke dari tanggal s/d
- 2) bahwa saya bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas kepada Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- 3) bahwa saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada saya melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa paksaan dari siapa pun. Apabila dikemudian hari teradapat kekeliruan danatau penyimpangan, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

....., 20.....
Pelaksana Perjalanan Dinas,



.....

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OKU,

EKA MEIRWANZA, SH.MM
PENATA TINGKAT I (III/d)
NIP. 197705012009031002

Pj. BUPATI OGAN KOMERING ULU,
ttd.

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 20 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22
TAHUN 2022 TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA
PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU



KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran:

No. Kuitansi :

KUITANSI

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
Sebesar : Rp
Terbilang :
Rupiah
Untuk pengeluaran : Biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan
kegiatan
dengan rincian :
1. uang harian : Rp
2. biaya transportasi : Rp
3. biaya penginapan : Rp
4. uang representasi
perjalanan dinas : Rp
5. biaya taksi : Rp

....., 20

Penerima



ttd

Menyetujui
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran,

ttd

NIP.

Bendahara
Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu,

ttd

NIP.

Pj. BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.

TEDDY MEILWANSYAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OKU,

EKA MEIRWANZA, SH.MM
PENATA TINGKAT I (III/d)
NIP. 197705012009031002